

DAFTAR ISI

TESIS.....	
ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB. I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Kerangka Analisis	16
1.6.1 Politik Anggaran	16
1.6.2 Pembiayaan Kegiatan Pemilihan	17
1.7 Definisi Konseptual.....	20
1.7.1 Politik Distributif	20
1.7.2 Anggaran Hibah Pilkada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 21	
1.8 Definisi Operasional.....	23
1.9 Metode Penelitian.....	23
1.9.1 Jenis Penelitian.....	23
1.9.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
1.9.3 Jenis Data	24

1.9.4	Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.9.5	Analisis Data.....	27
1.10	Sistematika Penulisan.....	28
BAB.II		30
PEMBIAYAAN PILKADA DAN POLITIK ANGGARAN PETAHANA		30
2.1	KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu Model Independen	30
2.2	Pilkada dan Pembiayaan Pilkada.....	35
2.2.1	Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	35
2.2.2	Pilkada Dari Rezim Pemilu ke Rezim Pemda.....	37
2.2.3	Pembiayaan Pilkada	39
2.3	Skema Pembiayaan Pilkada di Indonesia.....	48
2.3.1	Penyusunan Anggaran Sumber Biaya APBN	48
2.3.2	Penyusunan Anggaran Sumber Biaya APBD	52
2.3.3	Perbandingan Pembiayaan Penyelenggaraan Pilkada dengan Sumber Biaya APBN dan APBD.	57
2.4	Politik Anggaran Petahana Melalui Struktur Belanja APBD.....	60
2.5	Kesimpulan.....	63
BAB. III		65
PILKADA DAN <i>SETTING</i> POLITIK LOKAL		65
KABUPATEN PURBALINGGA		65
3.1	Pengantar.....	65
3.2	Pilkada dan <i>Setting</i> Politik Lokal Kabupaten Purbalingga Tahun 2010	65
3.2.1	Pemilu Legislatif 2009 dan Pencalonan Pilkada 2010.....	66
3.2.2	Profil Petahana di Pilkada 2010	69
3.2.3	Relasi Kontestan Eksekutif Petahana Dan Mayoritas Legislatif	70
3.3	Pilkada dan <i>Setting</i> Politik Lokal Kabupaten Purbalingga Tahun 2015	74
3.3.1	Pemilu Legislatif 2014 dan Pencalonan Pilkada 2015.....	75

3.3.2	Profil Petahana di Pilkada 2015.....	77
3.3.3	Relasi Kontestan Eksekutif Petahana Dan Mayoritas Legislatif	79
3.4	Pilkada dan <i>Setting</i> Politik Lokal Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.	82
3.4.1	Pemilu Legislatif 2019 dan Pencalonan Pilkada 2020.....	84
3.4.2	Profil Petahana di Pilkada 2020.....	87
3.4.3	Relasi Kontestan Eksekutif Petahana Dan Mayoritas Legislatif	88
3.5	Perbandingan Pilkada dan <i>Setting</i> Politik Lokal Kabupaten Purbalingga Tahun 2010, 2015, 2020.....	91
3.5.1	Perbandingan Pemilu Legislatif dan Pencalonan Pilkada di Tiga Periode	92
3.5.2	Perbandingan Profil Petahana di Pilkada 2010, 2015, dan 2020	93
3.5.3	Perbandingan Relasi Kontestan Eksekutif Petahana Dan Mayoritas Legislatif di Tiga Periode Pilkada.....	95
3.6	Kesimpulan.....	96
BAB. IV		98
KEMAMPUAN ANGGARAN DAERAH.....		98
MEMBIYAI PENYELENGGARAAN PILKADA.....		98
4.1	Pengantar.....	98
4.2	Pembiayaan Pilkada Purbalingga Tahun 2010.....	98
4.2.1	Kebutuhan Anggaran Pilkada 2010	99
4.2.2	Analisa Kinerja dan Kemampuan Anggaran Kabupaten Purbalingga periode 2007-2010.....	106
4.3	Pembiayaan Pilkada 2015	110
4.3.1	Kebutuhan Anggaran Pilkada 2015	110
4.3.2	Analisa Kinerja dan Kemampuan Anggaran Kabupaten Purbalingga periode 2012-2015.....	113
4.4	Pembiayaan Pilkada 2020	116
4.4.1	Kebutuhan Anggaran Pilkada 2020	116

4.4.2	Analisa Kinerja dan Kemampuan Anggaran Kabupaten Purbalingga periode 2017-2020.....	117
4.5	Pembiayaan Pilkada di Tahun 2010, 2015, dan 2020	119
4.5.1	Perbandingan Kebutuhan Anggaran Pilkada	120
4.5.2	Kinerja dan Kemampuan Anggaran Kabupaten Purbalingga periode 2010, 2015, dan 2020.	121
4.6	Kesimpulan.....	123
BAB. V		125
POLITIK ANGGARAN PETAHANA.....		125
DALAM KEBIJAKAN ANGGARAN HIBAH PILKADA		125
5.1	Pengantar.....	125
5.2	Politik Anggaran Petahana Dalam Kebijakan Anggaran Hibah Pilkada 2010	125
5.2.1	Proporsi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007-2010.	126
5.2.2	Politik Anggaran Petahana Dalam APBD 2010	129
5.3	Politik Anggaran Petahana Dalam Kebijakan Anggaran Hibah Pilkada 2015	133
5.3.1	Proporsi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012-2015.	134
5.3.2	Politik Anggaran Petahana Dalam APBD 2015	138
5.4	Politik Anggaran Petahana Dalam Kebijakan Anggaran Hibah Pilkada 2020	142
5.4.1	Proporsi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017-2020.	142
5.4.2	Politik Anggaran Petahana Dalam APBD 2020	145
5.5	Perbandingan Politik Anggaran Petahana Dalam Kebijakan Anggaran Hibah Pilkada 151	
5.5.1	Proporsi Pendapatan dan Belanja Daerah di Tiga Periode Analisis.	151
5.5.2	Perbandingan Politik Anggaran Petahana Dalam APBD 2010, 2015, 2020 ...	153
5.6	Kesimpulan.....	154
BAB. VI		155
KESIMPULAN.....		155
6.1	Kesimpulan.....	155



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**POLITIK ANGGARAN PETAHANA DALAM KEBIJAKAN ANGGARAN HIBAH PILKADA DI
KABUPATEN PURBALINGGA (Studi
Kasus pada Pilkada 2010, 2015, dan 2020)**

FRANCISCA MEGA L, Bayu Dardias Kurniadi, S.IP, M.A, M.Pub.Pol, Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

6.2	Implikasi Teori	158
6.3	Implikasi Kebijakan	159
6.4	Rekomendasi	160
Referensi		162

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kendala yang Dihadapi Penyelenggara di Beberapa Daerah Terkait Pembiayaan Pilkada melalui APBD	5
Tabel 1.2 Anggaran Pilkada Kabupaten Tahun 2010, 2015 dan 2020	7
Table 1.3 Hubungan Setting Politik, Kemampuan Anggaran Daerah, dan Politik Anggaran Petahana	9
Tabel 1.4 Daftar Penelitian Terdahulu	13
Tabel 1.5 Definisi Operasional	23
Tabel 1.6 Daftar Narasumber Wawancara	26
Tabel 2.1 Perkembangan Penyelenggara Pemilu di Indonesia	32
Tabel 2.2 Sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia	36
Table 2.3 Pemilu dan Pilkada dalam UUD NRI Tahun 1945	37
Tabel 2.4 Regulasi Pembiayaan Pilkada	42
Tabel 2.5 Perbandingan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemilihan Dengan Sumber Biaya APBN dan APBD	58
Tabel 2.6 Politik Distributif Calon Kepala Daerah Melalui Jenis Belanja Daerah	62
Tabel 3.1 Perolehan Suara Sah Dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2009	66
Tabel 3.2 Besaran Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) Koalisi Pendukung Petahana di Pilkada 2010	71
Tabel 3.3 Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga Hasil Pemilu 2009 Menurut Asal Fraksi dan Komisi	72
Tabel 3.4 Susunan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD	73
Tabel 3.5 Perolehan Suara Sah Dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2014	75
Tabel 3.6 Besaran Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) Koalisi Pendukung Petahana di Pilkada 2015	80
Tabel 3.7 Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga Hasil Pemilu 2014 Menurut Asal Fraksi dan Komisi	81
Tabel 3.8 Susunan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD	81
Tabel 3.9 Perolehan Suara Sah Dan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019	84

Tabel 3.10	Besaran Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) Koalisi Pendukung Petahana di Pilkada 2020.....	89
Tabel 3.11	Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Purbalingga Hasil Pemilu 2019 Menurut Asal Fraksi dan Komisi.....	90
Tabel 3.12	Susunan Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD.....	90
Tabel 3.13	Perbandingan Setting Politik Lokal Kabupaten Purbalingga di Pilkada Tahun 2010, 2015, dan 2020.....	92
Tabel 3.14	Perbandingan Profil Petahana Pilkada Kabupaten Purbalingga Tahun 2010, 2015 dan 2020.....	94
Tabel 3.15	Perbandingan Relasi Kontestan Petahana dan Legislatif di Pilkada 2010, 2015, dan 2020.....	95
Tabel 4.1	Jadwal Tahapan Program dan Kegiatan Pilkada dan Komponen Pembiayaannya	100
Tabel 4.2	Kriteria Tingkat Rasio Efisiensi Belanja Daerah.....	107
Tabel 4.3	Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	108
Tabel 4.4	Analisa Kinerja Keuangan dan Kemampuan Anggaran Kabupaten Purbalingga Periode 2007-2010.....	109
Tabel 4.5	Analisa Kinerja Keuangan dan Kemampuan Anggaran Kabupaten Purbalingga Periode 2012-2015.....	114
Tabel 4.6	Analisa Kinerja Keuangan dan Kemampuan Anggaran Kabupaten Purbalingga Periode 2017-2020.....	118
Tabel 4.7	Kebutuhan Anggaran Pilkada Kabupaten Purbalingga	120
Tabel 4.8	Kinerja Keuangan dan Kemampuan Anggaran di Tahun Penyelenggaraan Pilkada 2010, 2015, dan 2020.....	121
Tabel 4.9	Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota	122
Tabel 5.1	Negosiasi Usulan dan Persetujuan Anggaran Hibah Pilkada 2010	131
Tabel 5.2	Negosiasi Usulan dan Persetujuan Anggaran Hibah Pilkada 2015	139
Tabel 5.3	Negosiasi Usulan dan Persetujuan Anggaran Hibah Pilkada 2020	145
Tabel 5.4	Rincian Anggaran Belanja Hibah Kepada Organisasi Masyarakat	147
Tabel 5.5	Struktur APBD Di Pelaksanaan Pilkada 2010,2015, dan 2020	151
Tabel 5.6	Jenis Belanja Hibah Untuk Masyarakat.....	154
Table 6.1	Hubungan Setting Politik, Kemampuan Anggaran Daerah, dan Politik Anggaran Petahana	156

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Realisasi Belanja dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga	126
Grafik 2. Proporsi Target Pendapatan dan Alokasi Belanja Daerah.....	127
Grafik 3. Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2007-2010	128
Grafik 4. Rincian Realisasi Belanja Hibah Untuk Masyarakat.....	129
Grafik 5. Alokasi Target Pendapatan dan Belanja Daerah	135
Grafik 6. Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Daerah.....	135
Grafik 7. Alokasi Anggaran Belanja Hibah Untuk Masyarakat	136
Grafik 8. Realisasi Belanja dan SiLPA.....	137
Grafik 9. Nilai Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	138
Grafik 10. Alokasi Target Pendapatan dan Belanja Daerah	143
Grafik 11. Alokasi Target Pendapatan Asli Daerah.....	143
Grafik 12. Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Daerah.....	144
Grafik 13. Alokasi Anggaran Belanja Hibah Untuk Masyarakat TA. 2017-2020.....	146
Grafik 14. Hubungan Besaran Alokasi Anggaran Hibah Untuk Masyarakat Dengan Rasionalisasi Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2010, 2015, dan 2020	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1. Alur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Dalam Struktur APBN	51
Gambar 2-2. Skema Mekanisme Penyusunan Pendanaan Hibah Pilkada	54
Gambar 2-3. Alur Usulan Belanja Hibah Dalam Struktur Penyusunan Anggaran Daerah	56
Gambar 5-1. Penyerahan Bantuan Hibah Pembangunan Mushola.....	148
Gambar 5-2. Penerima Paket Bantuan Sembako Bergambar Foto Calon Kepala Daerah Petahana	150